

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang majemuk. Kemajemukan ini terlihat dari begitu banyaknya penghuni negara ini yang berasal dari latar belakang suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemajemukan atau keberagaman ini ibaratnya seperti api dalam sekam atau pedang bermata dua, *di satu sisi* keberagaman dan kemajemukan merupakan kekayaan dan kebanggaan bangsa yang tak ternilai harganya serta sebagai suatu potensi yang harus dibina, dipoles dan terus dikembangkan secara baik dan benar. Akan tetapi, *di sisi lain* kemajemukan dan keberagaman ini akan menjadi suatu tantangan yang sangat menakutkan dan membahayakan apabila tidak dikembangkan dan dibina secara baik dan benar.¹

Tantangan yang menakutkan bagi bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam (terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, ras dan budaya) adalah semakin menguatnya individualisme dan mengentalnya fanatisme, radikalisme, eksklusifisme dan intoleransi yang tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi perbedaan serta perlahan mulai mengeser nilai tenggang rasa, harmonisasi dan tepa selira (mawas diri) seperti yang sedang kita alami akhir-akhir ini.² Dikatakan menakutkan karena semakin dipertajam dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau golongan-golongan tertentu untuk mencapai segala ambisi dan kepentingan diri dan golongannya yang dapat menimbulkan pertentangan dan konflik horisontal yang terjadi, dan juga memicu kerusuhan sehingga menyebabkan terpuruknya bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus berikut: di

¹Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 5

²*Ibid.*, hal. 7

Lumanjang daerah Senduro pada tanggal 19 Februari 2018, Pura dirusak oleh pihak yang tak dikenal, tercatat 3 arca dihancurkan. Di DKI pada tahap pemilihan Calon Gubernur dan calon wakil Gubernur periode 2017/2022, pertarungan tidak hanya terjadi antara dua pasangan calon melainkan juga merupakan pertarungan antara dua kelompok pendukung dan pengikut masing-masing calon yang secara umum digambarkan sangat kontras yakni antara kelompok multikultural vs monokultural, kelompok inklusif vs eksklusif, kelompok mayoritas vs minoritas, kelompok pluralis vs singularis, kelompok nasional vs agamis, pribumi vs non-pribumi, dan seterusnya. Di Ambon dan Poso, terjadi konflik antar penganut agama yang satu dengan agama yang lain yang hampir menyeret bangsa ini menuju jurang kehancuran dan keterpurukan. Di Kalimantan terjadi konflik antar etnik yang mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan.³ Dan masih banyak lagi kasus yang dipicu oleh keberagaman dan kemajemukan.

Konflik serta tantangan-tantangan tersebut terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun hingga saat ini, tidak hanya disebabkan oleh keberagaman dalam hal suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat saja, melainkan konflik juga dipicu oleh perbedaan ideologi dan kepentingan. Konflik dan tantangan tersebut semakin diperparah dengan lahirnya generasi milenial yang lebih sering menjadi bagian dari *digital natives* dan *leisure class* yang menampilkan gaya hidup santai, acuh tak acuh dan lebih banyak memosisikan diri sebagai bagian dari masyarakat konsumen dari pada menjadi bagian dari gerakan *civil society*. Ini menjadi ciri khas dari abad ke 21 yang tidak bisa dihindari dan dibiarkan mengalir begitu saja, melainkan harus dihadapi dan

³Lihat tulisan Soedjatmoko, *Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa Depan* (1991). Dalam tulisannya, Soedjatmoko membahas masalah-masalah global. Sayang sekali belum sempat melihat toleransi hidup antar agama yang mulai mencuat pada pertengahan tahun 90-an beliau sudah wafat

dibenahi oleh pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia demi tercapainya semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.⁴

Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang telah dicanangkan oleh para pendiri negara Indonesia merupakan manifestasi suatu realita wajah bangsa Indonesia yang multikultural. Akan tetapi semboyan ini perlahan-lahan hanyalah sebuah mimpi dan angan-angan yang tidak akan pernah terwujud. Seperti hasil survei pada tahun 2010 hingga 2011 yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap 100 sekolah di Indonesia mencatat bahwa banyak siswa/i yang membenarkan tindakan kekerasan untuk isu keagamaan. Dari 1.000 siswa yang disurvei, ada 52,3% siswa yang setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama, 48,9% siswa yang bersedia ikut dalam aksi kekerasan serta bahkan ada 14,2% siswa yang setuju dan membenarkan serangan bom.⁵

Untuk menghadapi kondisi tersebut, salah satu jawabannya adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui bidang pendidikan kepada seluruh bangsa Indonesia khususnya generasi muda (anak-anak dan para remaja) sebagai penerus bangsa.⁶ Yang menjadi pertanyaannya adalah: sistem pendidikan seperti apakah yang mampu merangsang siswa-siswi sebagai penerus bangsa untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila demi mencapai keselarasan dan kesejahteraan sosial? Siapa saja yang berperan dalam proses internalisasi tersebut? Mengulas kembali sejarah, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Indonesia saat ini masih mengadopsi sistem pendidikan zaman kolonial. Pada zaman penjajahan Belanda, siswa “disekolahkan” dengan tujuan agar menjadi pekerja di perkebunan milik Belanda. Siswa diajarkan untuk dapat menghitung cepat dan menghafal materi dalam ruang-

⁴Mun'in Sirry, *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Puluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004, hal. 12

⁵Pusat Pengkajian Islam dan Manusia, Intoleransi Tumbuh di Banyak Sekolah dan Kampus <https://tirto.id/survei-uin-jakarta-intoleransi-tumbuh-di-banyak-sekolah-dan-kampus-csQL>, diakses pada 12 Oktober 2018.

⁶Darmaningtyas, dkk. *Membongkar Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Resolvi Perss/Ar-Ruzz, 2004, hal. 30.

ruang kelas. Kemampuan utama yang ditekankan oleh kurikulum saat itu tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja zaman kolonial.⁷

Sayangnya, sistem pendidikan seperti ini masih diadopsi sampai sekarang. Sekolah masih menekankan pada proses mekanikal, siswa diwajibkan hanya sekedar menghafal dan mengingat materi pelajaran di dalam kelas. Siswa dijadikan sebagai robot dan mesin pencari nilai karena kemampuan mereka hanya diukur dari segi nilai yang mereka peroleh di raport atau ijazah. Praktik demikian seringkali terjadi baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. Hal ini timbul sebagai implikasi dari kebijakan pemerintah dan sekolah yang perlahan mengabaikan aspek kecerdasan dan kreativitas siswa pada bidang lain seperti pengembangan karakter dan budi pekerti, seni, olahraga dan lainnya.⁸

Perlu kita sadari dan menjadi bahan evaluasi bahwa kecerdasan matematis dan pengetahuan alam memang penting, tetapi bukan berarti harus mengesampingkan bahkan mengabaikan kecerdasan lain seperti kecerdasan emosional dan spiritual. Justru kecerdasan emosional dan spiritual sangat berpengaruh dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa seorang individu. Berdasarkan hasil dari *Future of Job Reports* oleh *World Economic Forum*, di tahun 2020, generasi global dituntut untuk lebih menguasai kecerdasan emosional seperti pengembangan karakter, revolusi mental, kestabilan emosi, pemecahan masalah yang kompleks, manajemen diri, pemikiran kritis, kerjasama, negosiasi dan masih banyak lagi.⁹

Oleh karena itu, pengembangan sistem pendidikan dan kurikulum sekolah di Indonesia harus mengambil nilai-nilai tersebut sebagai pertimbangan dalam menyusun kurikulum

⁷Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan*, Yogyakarta, 2004, hal. 27

⁸*Ibid.*, hal. 42

⁹Wahid Institut.(2015). Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial-Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia. Diunduh dari [https:// www.neliti.com/id/publication/45149/laporan-intoleransi-dan-radikalisme-sosial-keagamaan-di-kalangan-muslim-indonesia-kbb-2017](https://www.neliti.com/id/publication/45149/laporan-intoleransi-dan-radikalisme-sosial-keagamaan-di-kalangan-muslim-indonesia-kbb-2017).

nasional. Radhar Panca Dahana menyatakan bahwa “untuk membuka minat dan antusiasme generasi muda penerus bangsa agar terlibat dalam proses pengembangan demokrasi, keselarasan, dan kesejahteraan sosial, kita tidak saja harus melakukannya sejak dini melalui peleburan isu ini dalam kurikulum pendidikan.¹⁰ Tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran mereka sebagai bagian dari warga negara yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari pada sekedar aktivitas yang *pleasure* dan konsumtif.” Maka, Sekolah, keluarga, masyarakat dan pemerintah harus menyadari bahwa pengembangan keterampilan sosial dan emosional telah muncul sebagai tujuan bersama dari sistem pendidikan di mana saja sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan sikap dan karakter yang peka dan peduli dalam diri setiap individu agar memberikan ruang bagi hadirnya perbedaan. Sehingga, revolusi pendidikan di Indonesia sangat dibutuhkan serta merupakan suatu keharusan karena melihat konteks serta permasalahan di atas. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan menerapkan sistem pendidikan berbasis multikulturalisme.

Pendidikan berbasis multikulturalisme adalah suatu sistem, alat, wahana ataupun faham pendidikan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dan kemandirian hidup yang kodrati dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan dirinya sendiri yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks.¹¹ Sistem serta wahana ini akan merangsang serta mendorong seseorang atau individu tertentu agar membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama yang pada akhirnya akan muncul suatu kesadaran bahwa keanekaragaman merupakan suatu realitas dinamis, suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan.¹² Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mentransformasikan proses pendidikan dengan cara harmonisasi olah hati (etik

¹⁰Radhar Panca Dahana, *Pendidikan Kultural – Ilahiah*, (Kompas, 25/5/2019).

¹¹Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 5

¹²*Ibid.*, hal. 21

dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik), sesuai dengan falsafah hidup Pancasila demi tumbuhnya benih-benih atau generasi-generasi yang menekankan serta mengutamakan harkat dan martabat kemanusiaan.¹³ Untuk itu diperlukan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara ketiga komponen utama, yakni sekolah, keluarga dan masyarakat yang menjadi pusat didik, dimana gerakan perubahan nasional dimulai.¹⁴

Dengan demikian, pendidikan berbasis multikulturalisme sebagai upaya penguatan identitas nasional bangsa ini sejalan dengan apa yang telah menjadi prioritas UNESCO dalam bidang pendidikan, dengan tujuan pendidikan adalah manifestasi hasil refleksi filosofi tentang manusia itu sendiri, eksistensi manusia dalam konteks sejarah hidupnya dan tentang sistem hubungan manusia dengan alam semesta, lingkungan tempat ia hidup dan berkreasi serta hubungannya dengan sesama manusia lain.¹⁵ Di tingkat nasional (Indonesia) ditambah lagi dengan hubungan manusia dengan yang transenden (Tuhannya). Semua tujuan ini terkandung dalam ke-5 sila Pancasila.

Bertolak dari uraian diatas, penulis pun tertarik untuk melakukan riset dengan tema yang berjudul: **“PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURALISME SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN SIFAT NASIONALISME MANUSIA INDONESIA”**.

1.2 Perumusan Masalah

a. Apa yang dimaksudkan dengan pendidikan berbasis multikulturalisme?

¹³Ismail, F, *Republik Bhinneka Tunggal Ika : Mengurai Isu-isu konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Kemenag Pusat, 2012)

¹⁴*Ibid.*, hal. 15

¹⁵*Ibid.*, hal. 22

- b. Bagaimana peran penting pendidikan berbasis multikultural dalam membentuk karakter serta identitas Nasional bangsa Indonesia
- c. Bagaimana memberlakukan dan mengembangkan pendidikan berbasis multikulturalisme sebagai upaya penguatan identitas Nasional bangsa Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membahas dan mengurai tentang pendidikan berbasis multikultural.
2. Untuk membahas dan menguraikan tentang apa itu identitas nasional bangsa Indonesia
3. Untuk mengetahui peran serta pengaruh pendidikan multikultural dalam pembentukan identitas atau jatidiri nasional bangsa Indonesia yang beragam ini.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Kegunaan Akademis

Refleksi ini dibuat yang lebih baik dan menginventarisir secara lebih teratur mengenai pendidikan berbasis multikultural sebagai upaya dalam membentuk identitas nasional bangsa Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Sosial

Penulis menghasilkan refleksi ini dengan maksud supaya bangsa Indonesia dan pembaca dapat menyadari dan memahami dengan baik akan makna pendidikan berbasis multikultural khususnya dalam membentuk karakter nasional bangsa Indonesia yang majemuk, agar semua bangsa indonesia dan pembaca dapat menjadi duta-duta kedamaian dan

kesejahteraan yang menyebarkan dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, keadilan serta persatuan dan kesatuan dalam perbedaan.

1.4.3 Kegunaan Personal

Tulisan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan wawasan penulis khususnya penerapan sistem pendidikan berbasis multikultural baik di rumah, sekolah serta masyarakat dalam mencapai kedamaian hidup mendalami dalam perbedaan dan kemajemukan. Selain itu, penulis lebih mampu nilai-nilai serta model-model multikultural sebagai nilai yang penting dan utama dalam menghidupi kedamaian dalam hidup bersama maupun dalam kehidupan personal penulis sehari-hari.